



# **KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU UNTUK PENANGANAN MENANGANI KUMUH DI KELURAHAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO**

Azky Falabiba, Budi Puspo Priyadi, Hartuti Purnaweni

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1296

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRAK**

Tingginya kepadatan penduduk di Indonesia berakibat munculnya permasalahan pada beberapa aspek, salah satunya masalah permukiman kumuh. Permukiman kumuh adalah suatu wilayah dengan beberapa permasalahan seperti kualitas permukiman tidak sesuai dengan standar minimal serta minimnya ketersediaan sarana prasarana pada suatu daerah sehingga perlu penanganan serius melalui strategi dan program penanganan yang tepat. Kelurahan Kutoarjo Kabupaten Purworejo merupakan salah satu wilayah kumuh yang berhasil mengurangi luasan wilayah kumuhnya sebesar 12% dalam kurun waktu 6 (enam) tahun melalui Program Kotaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa implementasi Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo dapat berhasil. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program Kotaku diawali dengan puncak kesuksesan pada kegiatan sosialisasi karena masyarakat sangat aktif dan mendukung adanya Program Kotaku. Adanya masalah yang terjadi pada tahap pelaksanaan dapat diselesaikan dengan baik oleh warga yang peduli terhadap kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini mempengaruhi proses implementasi pada tahap-tahap selanjutnya karena sebagian besar pelaksana Program Kotaku adalah masyarakat sendiri. Masyarakat Kelurahan Kutoarjo diharapkan dapat lebih mengetahui mengenai Program Kotaku sehingga ketika mendapatkan kembali program dapat mendukung kegiatan serta memiliki rasa peduli terhadap lingkungannya.

**Kata kunci: Implementasi, Permukiman kumuh, Program Kotaku**

## **ABSTRACT**

*The high population density in Indonesia has resulted in the emergence of problems in several aspects, one of which is the problem of slum settlements. A slum settlement is an area with several problems such as the quality of the settlement not complying with minimum standards and the minimal availability of infrastructure in an area so that it needs serious handling through appropriate strategies and handling programs. Kutoarjo Village, Purworejo Regency is one of the slum areas that has succeeded in reducing the area of its slum area by 12% in a period of 6 (six) years through the Kotaku Program. This research aims to analyze why the implementation of the Kotaku Program in Kutoarjo Village was successful. The research method used is a descriptive type using a qualitative approach using primary data sources and secondary data. The research results show that the successful implementation of the Kotaku Program begins with the peak of success in socialization activities because the community is very active and supports the Kotaku Program. Any problems that occur during the implementation stage can be resolved well by residents who care about the environmental conditions in which they live. This affects the implementation process in subsequent stages because most of the Kotaku Program implementers are the community themselves. It is hoped that the people of Kutoarjo Village will know more about the Kotaku Program so that when they get the program back they can support the activities and have a sense of concern for their environment.*

**Keywords: Implementation, Slum Area, Kotaku Program**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk sebanyak 275 juta jiwa yang menempati posisi ke-4 penduduk terbanyak di dunia (PBB, 2022). Pertumbuhan penduduk di dunia saat ini terus mengalami peningkatan seiring dengan perubahan waktu yang terus berjalan. Urbanisasi menjadi faktor utama munculnya masalah kepadatan penduduk di kota (Doloksaribu & Hidayat, 2020; Harahap dkk., 2013; Intan dkk., 2019). Masyarakat berbondong-bondong pindah dari daerah asalnya demi mendapatkan pekerjaan di kota

besar. Dampaknya kondisi demografis di kawasan perkotaan menjadi kurang kondusif sehingga muncul beberapa masalah seperti kepadatan penduduk yang tinggi (Kiswoyo dkk., 2023). Hasil perhitungan sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) mengenai jumlah penduduk di Indonesia secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini:

**Gambar 1. 1**  
**Jumlah dan Laju Pertumbuhan**  
**Penduduk Indonesia (Juta Jiwa)**



Sumber: Diolah dari BPS, 2020.

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk Indonesia dari tahun 1961 hingga 2020 selalu mengalami peningkatan. Selain peningkatan jumlah penduduk, di Indonesia juga terjadi ketidakmerataan penduduk yang berpusat di Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki luas sebesar 128.297 km<sup>2</sup> atau hanya 7% dari luas Indonesia, tetapi menampung 151,59 juta penduduk atau 56,1% dari total penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020). Adanya fakta tersebut berakibat munculnya permasalahan pada beberapa aspek. Salah satunya, yaitu masalah kawasan permukiman.

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman

yang tidak layak huni karena ketidakraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh adalah suatu wilayah yang bentuknya tidak terstruktur, tidak memiliki pola seperti susunan letak rumah yang tidak rata dan jalannya tidak beraturan, tidak memiliki persediaan fasilitas umum yang layak seperti sarana air bersih dan MCK, serta kondisi fisik yang membahayakan seperti mudah terkena banjir (Annas dkk., 2018; Widayatun & Fatoni, 2018; Zethary & Purnaweni, 2019).

Keberadaan kawasan permukiman kumuh di perkotaan dapat menjadi masalah serius bagi masyarakat maupun pemerintah, baik ditinjau dari aspek keruangan, estetika, lingkungan dan sosial (Wulan & Widodo, 2020; Ramadhan dkk., 2021; Wastiti dkk., 2020). Kualitas permukiman dapat dinilai dari adanya kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan kemampuan pengelolaan daerah sehingga butuh penanganan yang serius terkait permasalahan permukiman kumuh di suatu daerah. Hal ini tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki wilayah kumuh terluas di Indonesia. Menurut pendataan Balai Sarana Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah pada tahun 2019, luas permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah mencapai 2.982,88 Ha. Dibandingkan dengan luas seluruh wilayah Jawa Tengah, yaitu sebesar 32.800,69 Ha wilayah kumuh yang ada di Jawa Tengah meliputi 11% dari seluruh luas wilayah provinsi ini. Luas kawasan kumuh tersebut menyebar di beberapa kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang kepadatan penduduknya terus meningkat dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo terus meningkat dalam kurun waktu sepuluh tahun, yaitu tahun 2010 hingga 2020 jumlah penduduk Kabupaten Purworejo bertambah sekitar 74.45 ribu jiwa. Artinya rata-rata penduduk bertambah

7 ribu setiap tahunnya (Purworejo Dalam Angka, 2020).

Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo pada tahun 2020 sebanyak 797.951 jiwa yang tersebar di 16 kecamatan. Kecamatan Purworejo memiliki penduduk terbesar dengan jumlah 87.339 jiwa sehingga kepadatan penduduk Kabupaten Purworejo termasuk tinggi karena per km<sup>2</sup> dihuni oleh 766,86 penduduk. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Purworejo tahun 2019, yaitu sebesar 793.552 jiwa pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu satu tahun bertambah 8.101 jiwa atau meningkat sekitar 1,03% (Purworejo Dalam Angka, 2020).

Berdasarkan SK Bupati Purworejo Nomor 160.18/526 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, luas kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo meliputi 7 kelurahan di 2 kecamatan, dengan luas total mencapai 126,812 Ha. Beberapa kawasan kumuh tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1,1 berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Daftar Lokasi Permukiman Kumuh di**  
**Kabupaten Purworejo Tahun 2020**

<b>Nama Kawasan</b>	<b>Luas Wilayah (ha)</b>	<b>Luas Wilayah Kumuh 2014 (ha)</b>	<b>Luas Wilayah Kumuh 2020 (ha)</b>	<b>Pengurangan Wilayah (Ha)</b>
Pangenrejo	210	9,17	7,899	1,271
Mranti	125	4,39	4,39	0
Baledono	172	18,41	13,504	4,906
Purworejo	250	14,06	10,00	4,06
Keseneng	156	2,80	2,80	0
Pangenjurutengah	196	39,30	39,300	0
Kelurahan Kutoarjo	238	56,59	48,919	7,671
<b>TOTAL</b>		<b>144,72</b>	<b>126,812</b>	<b>17,908</b>

(Sumber: Surat Keputusan Bupati Purworejo 188.4/570/2014 dan 160.18/5526/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo)

Sesuai dengan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Kelurahan Kutoarjo merupakan kelurahan yang memiliki wilayah kumuh paling luas dibandingkan dengan beberapa kelurahan lainnya. Namun Kelurahan Kutoarjo mampu mengurangi jumlah luas wilayah kumuhnya, yaitu sebesar 7,671 Ha atau sekitar 13% dari luas wilayah kumuh awal, sedangkan jumlah luas wilayah kumuh Kelurahan Meranti, Kelurahan Keseneng, dan Kelurahan Pangenjurutengah masih

tetap atau tidak ada pengurangan sama sekali.

Dalam kurun waktu sekitar 6 (enam) tahun (tahun 2014 hingga tahun 2020) jumlah total wilayah kumuh dari beberapa kecamatan di Kabupaten Purworejo menurun sebanyak 17,908 Ha atau sekitar 12% (persen) dari jumlah total luas wilayah kumuh pada tahun 2014. Hal ini merupakan hasil dari pemerintah Kabupaten Purworejo dalam melakukan upaya penanganan permukiman kumuh, antara lain dengan implementasi Program Kotaku Skala Lingkungan yang telah mulai dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo sejak tahun 2017.

Simanjourang dalam penelitiannya menjelaskan bahwa keberhasilan dari Program Kotaku di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung dilihat dari masyarakat yang dapat menerima manfaat adanya program dan perubahan yang terlihat pada kondisi fisik kriteria permukiman kumuh (Simanjourang, 2021). Adapun keberhasilan Implementasi Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo dapat dilihat melalui perbedaan persentase kondisi awal dan kondisi akhir tujuh aspek kriteria permukiman kumuh sebagaimana nampak pada Tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1. 2**  
**Kondisi Awal dan Akhir Aspek Kriteria**  
**Permukiman Kumuh Kelurahan**  
**Kutoarjo**

No	Rerata Aspek	Persen (%)	
		Kondisi Awal ( <i>Baseline</i> )	Kondisi Akhir
1	Kondisi Bangunan Gedung	9,60	9,60
2	<b>Kondisi Jalan Lingkungan</b>	19,34	0,00
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	26,80	26,80
4	Kondisi Drainase Lingkungan	23,29	11,81
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	0,00	0,00
6	<b>Kondisi Pengelolaan Persampahan</b>	61,46	0,00
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	63,37	50,00

Sumber: Dokumen *Baseline* SK 2020  
Tentang Permukiman Kumuh Kabupaten  
Purworejo

Dari Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa Kelurahan Kutoarjo berhasil menangani permukiman kumuh dengan melihat perbandingan *baseline* (kondisi awal) dan kondisi akhir, yaitu seberapa besar masalah terkait kriteria permukiman kumuh yang telah teratasi.

Permasalahan utama permukiman kumuh di Kelurahan Kutoarjo antara lain

adalah masalah sampah. Dengan adanya implementasi Program Kotaku masalah sampah tersebut dapat teratasi 100%. Melihat dari Tabel 1.2 bahwa kondisi akhir terkait Pengelolaan Persampahan yang tadinya sebesar 61,46% menjadi 0% maka Implementasi Program Kotaku pada aspek pengelolaan sampah di Kelurahan Kutoarjo dalam upaya penanganan permukiman kumuh dapat dikatakan berhasil.

Implementasi Program Kotaku yang dilaksanakan di Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh telah terlaksana dengan baik karena dukungan Pemerintah Kecamatan Simpang Kiri. Peneliti lain menyatakan bahwa implementasi Program Kotaku di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi berjalan dengan baik dilihat dari para penanggung jawab, yaitu Tim Fasilitator, Lurah, BKM, Unit Pengelola Lingkungan, dan TIPP yang membuat *rundown* pelaksanaan program sebelum terjun ke lokasi kelompok penerima manfaat sehingga tahapan program yang dilakukan berjalan secara sistematis. Hasil penelitian lain menyatakan bahwa implementasi Program Kotaku di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Jambi terdapat halangan akibat dari sumber daya manusia aspek pelaksana, serta buruknya komunikasi antar aktor sehingga

menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan antar penggerak program. Mirani juga menyampaikan bahwa implementasi Program Kotaku di Kota Palembang telah terlaksana dengan baik akibat adanya partisipasi fisik dari masyarakat. Mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Kotaku yang tersebar di tiga kawasan lebih di Kota Palembang (Fitriani, 2020; Merta, 2021; Mirani dkk., 2019; Yana, 2022).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal terhadap warga Kelurahan Kutoarjo, hasil Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo memang sudah terlihat dan masyarakat setempat merasakan perbedaannya, namun dalam pelaksanaan implementasi Program Kotaku sendiri masih banyak dinamika yang terjadi dari masyarakat Kelurahan Kutoarjo sehingga keberhasilan program yang tercapai tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus dan lancar. Dengan demikian tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis proses implementasi Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo.

## **Kerangka Teori**

### **Administrasi Publik**

Administrasi Publik menurut Pfiffner dan Presthus adalah koordinasi antar pihak baik individu maupun kelompok untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Syafiie, 2006). Serupa dengan Chandler dan Plano yang mendefinisikan administrasi publik adalah proses koordinasi antar sumber daya serta anggota publik dalam rangka mengimplementasikan dan mengkoordinir keputusan yang diambil dalam kebijakan publik dengan berdasar pada seni dan ilmu untuk mengatur publik (Marliani, 2018).

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan adalah suatu keputusan yang diambil oleh pemilik kewenangan atau pejabat pada urusan kepentingan publik yang pada pelaksanaannya pemerintah memegang aturan dan tanggung jawab sebagai konsekuensi pada tindakannya (Hayat, 2017). Terdapat beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan, yaitu tujuan tertentu yang ingin dicapai, rangkaian tindakan, usulan tindakan dari sisi pemerintah maupun luar dan penyediaan sumber daya baik manusia maupun non manusia untuk melaksanakan program (Yaw, 2008). Biasanya kebijakan dibuat untuk mengatasi permasalahan publik yang sudah mengganggu kesejahteraan

masyarakat dalam bentuk kegiatan yang di dalamnya terdapat berbagai alternatif keputusan (Purba & Aufarul, 2016).

### **Implementasi Kebijakan**

Dalam implementasi suatu kebijakan terdapat 4 (empat) kegiatan yang dilakukan, yaitu *to carry out* atau kegiatan untuk menjalankan kebijakan, *to fulfil* atau kegiatan untuk memenuhi janji yang sudah dituliskan dalam dokumen kebijakan, *to produce* atau kegiatan untuk menghasilkan *output* yang sudah ditentukan dalam tujuan kebijakan, dan *to complete* atau kegiatan untuk menyelesaikan misi yang harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan (Nasution, 2016).

Dalam implementasi kebijakan terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dapat tercapai sebagai upaya penyelesaian permasalahan publik.

Keberhasilan implementasi program dapat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi yang hasilnya dapat diukur dengan dampak atau perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari hasil implementasi kebijakan, sesuai juga dengan Teori Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Nasution, 2016) yang

mengemukakan bahwa implementasi kebijakan setidaknya memiliki 3 (tiga) tahapan utama, yaitu proses pembuatan kebijakan atau tahapan persiapan kebijakan, proses implementasi atau tahapan pelaksanaan, dan proses evaluasi kebijakan atau tahapan evaluasi kebijakan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Situs penelitian ini adalah di Kelurahan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo karena Kelurahan Kutoarjo termasuk wilayah yang memiliki masalah permukiman kumuh paling tinggi tetapi dapat menangani secara cepat dibandingkan wilayah lain yang ada di Purworejo. Subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive* di mana informan dipilih secara khusus sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian maka ditemukan beberapa subjek penelitian, yaitu Kepala Bappedalitbang, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (Dinperkimtan), Koordinator Kotaku, Lurah Kelurahan Kutoarjo, Koordinator Fasilitator Kotaku, Koordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Koordinator Kelompok

Masyarakat (Pokmas), dan Masyarakat RW 05 dan RW 09.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa penelitian terdahulu. Data sekunder terdiri dari data angka, berupa data yang berbentuk presentase dan rata-rata, data tertulis, berupa uraian tertulis seperti undang-undang dan peraturan, data gambar, berupa simbol, diagram, dan peta, serta data tabel berupa data yang disajikan dalam bentuk tabel.

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara kepada seluruh informan yang telah ditentukan, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan 2 tahap, yaitu reduksi data dan penyajian data. Uji kualitas data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi berupa triangulasi sumber dan triangulasi waktu dengan cara melakukan wawancara berulang kali bersama subjek yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tahapan implementasi kebijakan Program Kotaku di Kelurahan

Kutoarjo terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap keberlanjutan. Dalam setiap tahapan tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin sekali setiap bulan oleh Dinperkimtan.

Teori implementasi kebijakan menurut Brian W. Hogwood dan Levis A. Gunn (dalam Nasution, 2016) menyampaikan bahwa implementasi kebijakan minimal memiliki 3 tahapan yang harus dilakukan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian tahapan implementasi kebijakan Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo karena memenuhi 3 (tiga) tahapan minimal implementasi kebijakan publik. Tiga tahapan implementasi kebijakan menurut Brian W. Hogwood dan Levis A. Gunn tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan implementasi kebijakan Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu sosialisasi,

pelatihan, dan pemetaan *baseline*.

Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan dilakukan untuk memberikan pengetahuan serta arahan terkait Program Kotaku serta indikator permukiman kumuh dengan maksud agar masyarakat Kelurahan Kutoarjo dapat memahami dan memiliki persepsi yang sama terhadap Program Kotaku sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai aturan yang ada.

Sosialisasi terdiri dari beberapa macam berdasarkan tingkat wilayahnya sehingga merata diikuti oleh setiap warga di Kelurahan Kutoarjo.

Saat kegiatan sosialisasi juga dilakukan penetapan tujuan secara bersama-sama terkait implementasi Program Kotaku sehingga tercipta pemahaman yang sama mengenai tujuan akhir antara para aktor implementasi dan masyarakat Kelurahan Kutoarjo sebagai penerima program. Sosialisasi ini merupakan kegiatan dari tahap persiapan yang menjadi puncak kesuksesan Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo karena berhasil menarik perhatian masyarakat

sehingga mereka mau aktif dan menanti adanya pelaksanaan Program Kotaku.

Pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang juga termasuk dalam tahapan persiapan Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo bertujuan untuk memberikan bekal bagi masyarakat berupa materi dan praktik yang nantinya akan digunakan pada saat tahap pelaksanaan Program Kotaku.

Adapun pemetaan *baseline* dilakukan oleh masyarakat dengan didampingi oleh fasilitator kelurahan untuk mengetahui daerah-daerah yang terdapat permasalahan kumuh dan perlu untuk segera ditangani.

Tahapan selanjutnya adalah tahap perencanaan program. Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu penyusunan RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) dan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) oleh LKM Karya Mandiri Kelurahan Kutoarjo. Penyusunan RPLP dilakukan dengan melihat hasil dari pemetaan *baseline* yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk membuat dokumen perencanaan yang akan digunakan

sebagai acuan dan kontrol oleh masyarakat Kelurahan Kutoarjo pada saat tahap pelaksanaan dilakukan.

Dokumen RPLP berisikan semua permasalahan terkait permukiman kumuh yang perlu ditangani di Kelurahan Kutoarjo beserta waktu dan anggaran yang sekiranya diperlukan serta gambaran konsep maupun teknis yang akan dilakukan untuk melaksanakan pembangunan penanganan permukiman kumuh. Selain itu dilakukan pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) oleh LKM Karya Mandiri Kelurahan Kutoarjo yang diberi tanggung jawab bidang pembangunan infrastruktur.

Ada 3 (tiga) KSM yang dibentuk dengan tujuan setiap kelompok mendapatkan satu bagian pembangunan. Fokus dari pembangunan dan perbaikan prasarana pada Program Kotaku skala lingkungan di Kelurahan Kutoarjo ada 3 (tiga), yaitu pembangunan jalan, drainase, dan pengolahan sampah.

#### **b. Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan implementasi kebijakan Program Kotaku di

Kelurahan Kutoarjo berupa pembangunan dan perbaikan kondisi fisik di Kelurahan Kutoarjo dengan mengacu pada dokumen RPLP yang telah disahkan sebelumnya. Tahap pelaksanaan berupa pembangunan fisik tersebut dilakukan oleh masyarakat anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) sesuai pembagian yang telah dilakukan dengan dibantu fasilitator kelurahan di bawah monitoring dan evaluasi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Kabupaten Purworejo dan Koordinator Kotaku. Adapun fokus pembangunan dan perbaikan fisik Program Kotaku skala lingkungan di Kelurahan Kutoarjo adalah pembangunan jalan beton, drainase cor bertulang, dan bangunan pengolahan sampah terpilah (TPST) yang dilakukan di RW 05 dan RW 09 Kelurahan Kutoarjo.

Dalam teori implementasi kebijakan Brian W. Hogwood dan Levis A. Gunn, pada tahap pelaksanaan dilakukan penetapan metode yang digunakan, penetapan anggaran, dan penetapan keterlibatan sumber daya.

Tahap pelaksanaan implementasi kebijakan Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo telah sesuai dan menggambarkan indikator-indikator yang ada pada teori implementasi kebijakan.

Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan fisik Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo termasuk dalam tahap pelaksanaan implementasi kebijakan dengan memanfaatkan struktur birokrasi, sumber daya, prosedur, anggaran, dan waktu yang telah secara jelas ditetapkan dalam Surat Edaran DJCK Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.

### **c. Tahap Evaluasi**

Tahap evaluasi dilakukan dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi pada sebelum, ketika, dan setelah tahapan yang dilakukan pada saat Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo. Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Purworejo dan Koordinator Kotaku yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan yang dilakukan dalam implementasi Program Kotaku sudah

berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan terlaksana secara efektif.

Menurut Brian W. Hogwood dan Levis A. Gunn, tahap evaluasi merupakan tahap terakhir yang dilaksanakan dalam implementasi kebijakan. Pada tahapan evaluasi kebijakan ini dilakukan penentuan jadwal survei, pelaksanaan pemantauan atau monitoring dan evaluasi, dan dilakukan pengawasan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo dalam setiap tahapannya telah dilakukan monitoring dan evaluasi yang dijadwalkan minggu ke-4 setiap bulannya. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Program Kotaku telah sesuai dengan dokumen perencanaan RPLP yang telah disahkan sebelumnya. Namun ternyata kegiatan monitoring dan evaluasi pada Program Kotaku ini masih kurang detil dan belum maksimal karena adanya kesalahan pada saat tahap pelaksanaan, tetapi pihak pengawas tidak dapat mengetahuinya lebih awal.

**Tabel 1.3**  
**Tahapan Program Kotaku**

<b>Tahap Persiapan</b>		
Sosialisasi	Pelatihan	Pemetaan Baseline
Paket Sosialisasi Program yang terdiri dari beberapa tahapan sosialisasi, yaitu Sosialisasi Kelurahan, Sosialisasi Massal Rembug Warga, dan Sosialisasi Program Di Level Komunitas (Lokasi Kawasan Kumuh)	Beberapa pelatihan dilaksanakan untuk memberikan bekal masyarakat sebagai pelaksana program. Pelatihan tersebut adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Livelihood</li> <li>2. Pelatihan Keterampilan Tukang, Pelatihan LKM</li> <li>3. UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan)</li> <li>4. TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif)</li> <li>5. Pelatihan KSM-KPP (Kelompok Swadaya Masyarakat-Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara)</li> <li>6. Pelatihan Lurah.</li> </ol>	Pemetaan wilayah untuk menentukan daerah mana saja yang memiliki masalah permukiman kumuh sesuai dengan 7 indikator kumuh. Hasil dari pemetaan <i>baseline</i> dirangkum pada RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) kemudian diterbitkan SK Kumuh.
<b>Tahap Pelaksanaan (Pembangunan fisik)</b>		
Perbaikan Jalan	Drainase	Pengelolaan Sampah
Perbaikan jalan beton dilaksanakan oleh KSM Antasena di beberapa kawasan RW -5 dan RW 09 Kelurahan Kutoarjo, tepatnya di RT 04 RW 05 dan RT 02, RT 03, RT 04 RW 09	Perbaikan drainase cor beton bertulang dilakukan oleh KSM Antasena Kelurahan Kutoarjo di beberapa wilayah di R2 05 dan RW 09, tepatnya di RT 01, RT 08 RW 05 dan RT 01, RT 02, RT 03, RT 04 RW 09	Pengelolaan sampah dilakukan melalui kerja sama antar masyarakat melalui bank sampah dan TPST dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo

**Tahap Evaluasi**

Terdapat jadwal monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinperkimtan dan Korkot pada minggu ke-4 setiap bulannya. Monitoring dan evaluasi dilakukan pada setiap tahapan yang dilalui dalam implementasi Program Kotaku.

Sumber:Penulis, 2023

**Gambar 1.2**  
**Kondisi Fisik Sebelum dan Sesudah Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo**



**KESIMPULAN**

Keberhasilan implementasi Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo yang ditandai dengan berkurangnya luasan permukiman kumuh dipengaruhi oleh 3 (tiga) tahapan program yang berjalan dengan baik. Puncak

kesuksesan terjadi pada tahap persiapan khususnya pada kegiatan sosialisasi. Tim panitia sosialisasi telah melaksanakannya dengan baik sehingga masyarakat Kelurahan Kutoarjo tertarik dan tumbuh rasa kepedulian terhadap jalannya Program Kotaku. Mereka menantikan hasil dari program tersebut yang berpengaruh pada kegiatan selanjutnya, yaitu Tahap Pelaksanaan. Masalah yang terjadi pada tahap pelaksanaan dapat ditangani oleh Pokmas dan tokoh masyarakat yang peduli terhadap Program Kotaku sehingga pekerjaan yang semula dilakukan oleh KSM tetapi tidak selesai, berhasil ditangani dan diselesaikan 100% oleh tokoh masyarakat bersama dengan Pokmas.

### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan peneliti antara lain:

1. Meningkatkan rasa kepedulian warga setempat terhadap lingkungannya dengan memberikan informasi terkait lingkungan yang indah dan bersih hasil dari Program Kotaku

sehingga ketika Kelurahan Kutoarjo kembali menerima Program Kotaku lebih banyak masyarakat yang peduli dan mau ikut serta mensukseskan pelaksanaan program tersebut.

2. Memperketat seleksi pemilihan anggota KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai penggerak Program Kotaku melalui tes tertulis maupun lisan sehingga diharapkan kelompok masyarakat tersebut hanya melibatkan warga yang memiliki tujuan dan keinginan memperbaiki lingkungan tempat tinggalnya tanpa mencari keuntungan.
3. Memperketat pengecekan administrasi Laporan Pertanggungjawaban Program Kotaku (LPJ) yang dilakukan oleh akuntan publik, supaya antara pengerjaan dengan laporan yang ditulis tidak ada perbedaan dan manipulasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Aisyahwati, V. F. (2018). *Implementasi*

- Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh (Studi Pada Badan Keswadayaan Masyarakat (Bkm) Kelurahan ....*  
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165854>
- Alfiani, K. (2018). *Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Penanganan Pemukiman Kumuh melalui Program KOTAKU (Studi di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota ...*  
[http://repository.ub.ac.id/162440/%0Ahttp://repository.ub.ac.id/162440/1/Kartika Alfiani.pdf](http://repository.ub.ac.id/162440/%0Ahttp://repository.ub.ac.id/162440/1/Kartika%20Alfiani.pdf)
- Annas, A., Soemitro, R. A. A., & Santoso, E. B. (2018). Analisis Penentuan Infrastruktur Prioritas Pada Kawasan Kumuh Lingkungan Kerantil Kota Blitar. *Journal of Civil Engineering*, 33(2), 56.  
<https://doi.org/10.12962/j20861206.v33i2.4568>
- Doloksaribu, E. A., & Hidayat, Z. (2020). Pelaksanaan Strategi Penanganan Penataan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 1–14.
- Dyah Nawang Wulan, N., & Widodo, A. prasetyo. (2020). Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 1(2), 84–98.  
<https://doi.org/10.46730/japs.v1i2.24>
- Fitriani, P. (2020). *Penerapan Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.*
- Handayani, F., & Warsono, H. (2021). *Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang.* 1–13.
- Harahap, F. R., Sos, S., & Si, M. (2013). *Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia.* 1(1), 35–45.
- Hayat. (2017). Manajemen Kebijakan Publik. *Intrans Publishing, September 2017*, 121.  
[https://www.researchgate.net/publication/335788910\\_Buku\\_Kebijakan\\_Publik](https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik)
- Intan, Nurcahyanto, H., & Musawa. (2019). Strategi Penanganan Gelandangan Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5–24.
- Kiswoyo, G. P., Nurcahyanto, H., & (2023). Proses Collaborative Governance Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota *Policy and Management* ....  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/37955%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/37955/28670>
- Marliani, L. (2018). Metamorfosis Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 150, 1-7.
- Merta, R. A. (2021). *Implementasi Pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Cipta Karya Di Kota Jambi.*  
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Mirani, D., Agustina, S., & Ghoffar Ismail,

- R. (2019). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh Dalam Upaya Menambah Destinasi Wisata Baru Di Kota Palembang. *Jurnal Empirika*, 4(1), 1410–8364.
- Nasution, C. (2016). *Kebijakan dan Implementasi*. 1–23.
- PBB. (2022). *Petunjuk Teknis Teknik Delienasi Kawasan Permukiman Kumuh*.
- Purba, J. E. A., & AUFARUL, M. (2016). Analisis Peran Aktor Dalam Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Kelurahan Bandarharjo Semarang Utara, Kota Semarang. *Administrasi Publik*, 152(3), 28.  
file:///Users/andreaataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias\_ALAD\_11\_Nov\_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.
- Purba, J. E. A., & Marom, A. (2021). Analisis Peran Aktor dalam Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara, Kota. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(1). [http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/the-world-economy\\_9789264022621-en#.WQjA\\_1Xyu70%23page3%0Ahttp://www.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.1191273%0Ahttps://greatergood.berkeley.edu/images/application\\_uploads/Diener-Subje](http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/the-world-economy_9789264022621-en#.WQjA_1Xyu70%23page3%0Ahttp://www.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.1191273%0Ahttps://greatergood.berkeley.edu/images/application_uploads/Diener-Subje)
- Purworejo, B. K. (2020). *No Title*.
- Purworejo, Dalam Angka. (2021). *Profil Kependudukan Kabupaten Purworejo Tahun 2021*. 4(1), 1–23.
- Putri, I. (2021). *Peran Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi pada Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah)*. Universitas Lampung.
- Ramadhan, F. M., Setianingsih, E. L., & Lituhayu, D. (2021). Implementasi Program Kotaku Di Kelurahan Gedanganak. *Journal of Public Policy and Management Review*, 024.
- Simanjanrang, F. . (2021). Evaluasi program kotaku sebagai penanganan kumuh di kecamatan panjang. *Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP)*, 1(1), 1–11. <https://snip.eng.unila.ac.id/ojs/index.php/snip/article/download/27/66>
- Syafiie, I. K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik* (2 ed.). Rineka Cipta.
- Wastiti, A., Purnaweni, H., & Zarkasyi, A. (2020). Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*.
- Widayatun, & Fatoni, Z. (2018). Permasalahan Kesehatan dalam Kondisi Bencana:Peran Petugas Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat (Health Problems in a Disaster Situation: the Role of Health Personnels and Community Participation). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 8(1), 37–52. <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/21/15>
- Yana, F. (2022). Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

*Kotaku.Pu.Go.Id*, 2–3.  
<http://kotaku.pu.go.id/view/3879/pembangunan-ekonomi-dalam-konsep-pembangunan-berkelanjutan>

Yaw, A. La. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Atmospheric Environment*, 42(13), 2934–2947.

Zethary, R. E., & Purnaweni, H. (2019). Implementasi Program Kotaku Dalam Revitalisasi Daerah Kumuh di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 224–238.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/24912>